

BAB II

PENDIDIKAN NILAI DAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN NILAI DISIPLIN DI LINGKUNGAN PESANTREN

A. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian penulis diantaranya dilakukan oleh Yuningsih (2008) dalam sebuah tesisnya yang berjudul "*Pembinaan Nilai Disiplin di Lingkungan Pesantren*" yang merupakan hasil studi deskriptif di Pesantren Persatuan Islam No 67 Benda-Nagarasari Kota Tasikmalaya.

Penelitian tentang pengembangan nilai disiplin di lingkungan pesantrennya berangkat dari fenomena menurunnya nilai-nilai disiplin dikalangan pelajar dewasa ini, indikatornya dapat di lihat dari kasus banyaknya siswa yang di luar sekolah pada saat jam pelajaran, tawuran, menggunakan pakaian yang tidak mengikuti aturan pakaian sekolah, datang terlambat ke sekolah, dan sebagainya.

Disiplin merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui serangkaian proses yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Disiplin akan membuat individu mampu membedakan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan, yang boleh dilakukan dan yang tidak sepatutnya dilakukan.

Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, peneliti mencoba menggali praktek pengembangan nilai disiplin di lingkungan Pesantren Persatuan Islam Benda Nagarasari Tasikmalaya. Masalah difokuskan kepada sistem pendidikan bagaimana yang diterapkan dalam menanamkan nilai

diisiplin, aspek yang dijadikan indikator penerapan nilai disiplin, pihak yang dilibatkan dalam penanaman nilai disiplin, pengaruh pengembangan nilai disiplin terhadap santri dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembangan nilai disiplin.

Teknik pengeumpulan data yang digunakan terdiri atas teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Tahapan penelitian yang ditempuh terdiri dari tahap pralapanan, tahap lapangan dan tahap analisis dan interpretasi data.

Penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Pesantren Persis Benda menggunakan pendekatan *Full Day and Boarding System* (semua santri diasramakan dan belajar penuh). Indikator-indikator yang dijadikan sebagai parameter penjiwaan nilai disiplin santri di lingkungan pesantren terdiri atas; 1) sikap, tingkah laku, penampilan dan cara berpakaian santri. 2) ketepatan waktu belajar dan beribadah. 3) kepedulian santri terhadap kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan pesantren. 4) kepatuhan dalam melaksanakan tugas. Proses penanaman nilai disiplin di pesantren dimulai dengan membuat pedoman berperilaku yang diterapkan di lingkungan Pesantren Persatuan Islam Benda Nagarasari Tasikmalaya. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penanaman nilai di lingkungan pesantren persatuan Islam Benda terdiri atas Pembina, Pengajar, Pengelola, Wakil *Mudirul'am* serta Penjaga Pesantren/Satpam, bahkan santri sendiri melalui wadah *Rijahul Ghad* (RG) dan *Ummahatul Ghad* (UG). Pengaruh penanaman nilai disiplin pada santri diantaranya tampak dalam hal-hal sebagai berikut: 1) alasan satri memilih Pesantren Persis Benda Tasikmalaya. 2)

prilaku keseharian santri selama di pesantren. 3) kebiasaan berpakaian santri sehari-hari. 4) kebiasaan mengucapkan salam. 5) kebiasaan membaca Al Qur'an. 6) kebiasaan membuat dan melaksanakan jadwal kegiatan. 7) kebiasaan dalam mengikuti shalat berjamaah dan tahajud. 8) kebiasaan meminjam buku ke perpustakaan. 9) kebiasaan merokok. 10) keterlibatan dalam kegiatan kebersihan, ketertiban dan keamanan. 11) tanggapan santri terhadap tatakrama dan tata tertib yang ditetapkan pesantren.

Penelitian terdahulu yang relevan lainnya dilakukan oleh Soheh (2003), hasil penelitiannya tertuang dalam sebuah tesis yang berjudul *Peranan Keteladanan dan Wibawa Kyai dalam Membina Nilai-nilai Disiplin Santri* studi deskriptif di Pondok Pesantren As-Syafi'iyah Sukabumi.

Fokus penelitiannya pada peranan keteladanan dan wibawa kyai dalam fungsi sebagai tokoh teladan, guru (pengajar) dan motivator dalam membina nilai-nilai disiplin santri melalui disiplin beribadah, disiplin belajar dan disiplin waktu serta perilaku santri di pondok pesantren.

Penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis ditujukan untuk menggali esensi makna yang terkandung dalam kehidupan pondok pesantren, khususnya peranan keteladanan dan wibawa kyai sebagai tokoh teladan, guru (pengajar) dan motivator, yaitu: 1) apa yang tampil dalam pengalaman berarti bahwa seluruh proses merupakan obyek studi, 2) apa yang langsung diberikan kyai dalam pengalaman itu secara langsung hadir bagi yang mengalaminya (santri). Langkah-langkah pengumpulan datanya dibagi menjadi empat tahap: 1) tahap orientasi, 2) tahap eksplorasi, 3) tahap triangulasi, 4) tahap audit trail dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data tersebut dianalisis untuk mengungkapkan makna esensial

dari fenomena-fenomena alamiah dengan tidak mengabaikan aspek-aspek budaya, historis, geografis, psikologis, sosilogis dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi bahan munculnya data tentang peranan keteladanan dan wibawa kyai dalam fungsi sebagai tokoh teladan, guru (pengajar) dan motivator dalam membina nilai-nilai disiplin santri.

Penelitiannya menyimpulkan: 1) peranan keteladanan dan wibawa kyai dalam fungsi pembinaan santri sebagai tokoh teladan tercermin melalui perbuatan dan tindakan kyai pada setiap kegiatan kehidupan sehari-hari sebagai panutan dalam pembinaan, pelatihan dan pembiasaan disiplin beribadah, disiplin belajar dan disiplin waktu, 2) peranan keteladanan dan wibawa kyai dalam fungsi sebagai guru (pengajar) ditunjukkan dengan syarat profesional menjadi guru (pengajar) bagi santrinya, yaitu syarat fisik, psikis, mental, moral dan intelektual yang matang sehingga dapat mengembangkan tanggung jawab kyai dengan sebaik-baiknya menjadi guru (pengajar) yang mampu melaksanakan fungsinya dan mampu bekerja untuk mencapai tujuan pendidikan, 3) peranan keteladanan dan wibawa kyai dalam fungsi sebagai motivator, ditunjukkan dengan menjadikan dirinya sebagai motor penggerak dan pemberi semangat pada setiap kegiatan agar dapat berjalan aktif, tertib dan lancar bagi diri santri, 4) telah melahirkan pengalaman individu santri dalam memunculkan sikap kepribadian baru bagi santri melalui keteladanan dan wibawa kyai, sehingga proses pembinaan, pelatihan dan pembiasaan disiplin beribadah, disiplin belajar dan disiplin waktu dapat berjalan dengan baik.

B. Makna dan Hakikat Nilai

Kata *value* berasal dari bahasa Latin *valare* atau bahasa Prancis Kuno *valoir* yang artinya nilai. Kata *valare*, *valoir*, *value* atau *nilai* dapat dimaknai sebagai harga. Hal ini selaras dengan definisi nilai menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1994:690) yang diartikan sebagai harga (dalam arti taksiran harga). Namun, kalau kata tersebut sudah dihubungkan dengan suatu obyek atau dipersepsi dari suatu sudut pandang tertentu, harga yang terkandung di dalamnya memiliki tafsiran yang bermacam-macam. Harga suatu nilai hanya akan menjadi persoalan ketika hal itu diabaikan sama sekali. Maka manusia dituntut untuk menempatkannya secara seimbang atau memaknai harga-harga lain, sehingga manusia diharapkan berada dalam tatanan nilai yang melahirkan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Untuk memahami makna dan hakikat nilai, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian nilai menurut para ahli, diantaranya Mulyana (2004:11) mengungkapkan bahwa nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Definisi tersebut secara eksplisit menyertakan proses pertimbangan nilai, tidak hanya sekedar alamat yang dituju oleh sebuah kata 'ya'. Adapun Fraenkel (1977:6) mengungkapkan bahwa *A value is an idea-a concept-about what someone thinks is important in life* (Nilai adalah idea atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang). Sedangkan Bartens (2004:5) mengungkapkan bahwa nilai memiliki tiga ciri, yaitu 1) nilai berkaitan dengan subyek. Kalau tidak ada subyek yang menilai, maka nilai juga akan tidak ada. Beliau memberikan ilustrasi entah manusia hadir atau tidak,

gunung tetap meletus. Tapi untuk dapat dinilai sebagai ‘indah’ atau ‘merugikan’ gunung berapi itu memerlukan subyek untuk menilai; 2) nilai tampil dalam suatu konteks praktis; dan 3) nilai-nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh subyek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek. Sementara Milton Rokeah dalam Djahiri (1985:20) mengungkapkan bahwa nilai adalah suatu kepercayaan/keyakinan yang bersumber pada sistem nilai seseorang, mengenai apa yang patut dilakukan seseorang atau mengenai apa yang berharga dari apa yang tidak berharga.

Pakar lainnya yang mengungkapkan definisi nilai adalah Kluckhohn dalam Mulyana (2004:10) yang mengungkapkan bahwa nilai adalah konsepsi (tersurat atau tersirat, yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi tindakan pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir. Definisi ini berimplikasi terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya, seperti yang diungkap oleh Brameld dalam bukunya tentang landasan-landasan budaya pendidikan. Dia mengungkapkan ada enam implikasi terpenting yaitu sebagai berikut:

1. Nilai merupakan konstruk yang melibatkan proses kognitif (logis dan rasional) dan proses ketertarikan dan penolakan menurut kata hati.
2. Nilai selalu berfungsi secara potensial, tetapi selalu tidak bermakna apabila diverbalisasi.
3. Apabila hal itu berkenaan dengan budaya, nilai diungkapkan dengan cara yang unik oleh individu atau kelompok.

4. Karena kehendak tertentu dapat bernilai atau tidak, maka perlu diyakini bahwa pada dasarnya disamakan (*equated*) dari pada diinginkan, ia didefinisikan berdasarkan keperluan sistem kepribadian dan sosio budaya untuk mencapai keteraturan atau menghargai orang lain dalam kehidupan social
5. Pilihan di antara nilai-nilai alternatif dibuat dalam konteks ketersediaan tujuan antara (*means*) dan tujuan akhir (*ends*).
6. Nilai itu ada, ia merupakan fakta alam, manusia, budaya dan pada saat yang sama ia adalah norma-norma yang telah disadari.

Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia sebagai subjek penilai yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa (kehendak) dan kepercayaan. Sesuatu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik, dan sebagainya.

Salah satu cara yang sering digunakan untuk menjelaskan apa itu nilai adalah membandingkannya dengan fakta. Jika berbicara tentang fakta maka itu adalah sesuatu yang ada dan terjadi. Tetapi jika berbicara dengan nilai, maka itu adalah sesuatu yang berlaku, mengikat, dan menghimbau. Nilai berperan dalam suasana apresiasi atau penilaian dan akibatnya sering dinilai secara berbeda dari orang lain. Salah satu ilustrasi mengenai fakta dan nilai adalah terjadinya gempa di Yogyakarta. Hal itu merupakan suatu fakta yang dapat diukur yakni 6,9 pada

skala richter dengan terjadinya retakan di dasar laut pantai selatan. Di lain hal, gempa itu bisa juga dilihat sebagai nilai atau menjadi obyek penilaian. Bagi fotografer kejadian itu adalah sangat bernilai untuk diabadikan sebagai kejadian langka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka yang teguh imannya menganggap gempa adalah ujian keimanan. Oleh karena itu, nilai selalu berkaitan dengan penilaian seseorang sedangkan fakta menyangkut ciri-ciri obyektif.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan kembali bahwa nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan definisi itu maka yang dimaksud dengan *hakikat* dan *makna* nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Nilai bersifat abstrak, berada di balik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang ke arah yang lebih kompleks.

Kattsoff dalam Soemargono (2004:323) mengungkapkan bahwa hakekat nilai dapat dijawab dengan tiga macam cara: *Pertama*, nilai sepenuhnya berhakekat subyektif, tergantung kepada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri. *Kedua*, nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontologi, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. *Ketiga*, nilai-nilai merupakan unsur-unsur obyektif yang menyusun kenyataan

Sementara Sadulloh (2004:36) mengemukakan tentang hakikat nilai berdasarkan teori-teori sebagai berikut: menurut teori *voluntarisme* nilai adalah

suatu pemuasan terhadap keinginan atau kemauan, menurut kaum *hedonisme* hakikat nilai adalah “*pleasure*” atau kesenangan, sedangkan menurut *formalisme*, nilai adalah sesuatu yang dihubungkan pada akal rasional. Dan menurut *pragmatisme*, nilai itu baik apabila memenuhi kebutuhan dan nilai instrumental yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Mengenai makna nilai, Kattsoff mengatakan bahwa nilai mempunyai beberapa macam makna. Rumusan yang bisa penulis kemukakan tentang makna nilai itu adalah bahwa sesuatu itu harus mengandung nilai (berguna), merupakan nilai (baik, benar, atau indah), mempunyai nilai artinya merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap ‘menyetujui’ atau mempunyai sifat nilai tertentu dan memberi nilai yang berarti menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu.

Berdasarkan tipenya, nilai dapat dibedakan antara nilai instrinsik dan nilai instrumental. Nilai instrinsik merupakan nilai akhir yang menjadi tujuan, sedangkan nilai instrumental adalah sebagai alat untuk instrinsik. Nilai instrinsik adalah nilai yang memiliki harga dalam dirinya, dan merupakan tujuan sendiri. Sebagai contoh seorang yang melakukan ibadah shalat memiliki nilai instrinsik dan instrumental. Nilai instrinsiknya adalah perbuatan yang sangat luhur dan terpuji sebagai salah satu pengabdian kepada Allah swt, nilai instrumennya dengan melakukan ibadah shalat secara ikhlas dapat mencegah orang untuk berbuat jahat dan menjauhi larangan Allah swt.

Terdapat beberapa hal yang menjadi kriteria nilai, yaitu sesuatu yang menjadi ukuran dari nilai tersebut, apakah bernilai baik atau buruk. Status metafisika nilai adalah bagaimana nilai itu berhubungan secara realitas. Sadulloh (2004:23) mengungkapkan bahwa objektivisme nilai itu berdiri sendiri, namun bergantung dan berhubungan dengan pengalaman manusia. Pemahaman terhadap nilai jadi berbeda satu sama lainnya. Menurut objektivisme logis nilai itu suatu wujud, suatu kehidupan logis yang tidak terkait dengan kehidupan yang tidak dikenalnya, namun tidak memiliki status dan gerak dalam kenyataan. Menurut objektivisme metafisik nilai adalah suatu yang lengkap, objektif, dan merupakan bagian daktif dari realitas metafisik.

Menurut para ahli ekonomi nilai dipandang secara material yang berkaitan dengan jumlah nominal dari nilai uang atau barang, berbeda dengan ilmu-ilmu behavioral lebih mempertimbangkan pentingnya nilai-nilai perilaku (*behavioral values*)

Nilai berhubungan dengan aspek keyakinan manusia dalam menentukan pilihannya, ia bersifat abstrak namun riil adanya. Rescher (1969:14-19) mengemukakan bahwa nilai dapat diklasifikasikan menjadi enam sebagai berikut:

1. *Pengakuan*, yaitu pengakuan subjek tentang nilai yang harus dimiliki seseorang atau suatu kelompok, misalnya nilai profesi, nilai kesukuan atau nilai kebangsaan.
2. *Objek yang dipermasalahkan*, yaitu cara mengevaluasi suatu objek dengan berpedoman pada sifat objek yang dinilai, seperti manusia dinilai dari kecerdasannya, bangsa dinilai dari keadilan hukumnya.

3. *Keuntungan yang diperoleh*, yaitu menurut keinginan, kebutuhan, kepentingan atau minat seseorang yang diwujudkan dalam kenyataan, contohnya kategori nilai ekonomi, maka keuntungan yang diperoleh berupa produksi; kategori nilai moral, maka keuntungan yang diperoleh berupa nilai kejujuran
4. *Tujuan yang akan dicapai*, yaitu berdasarkan tipe tujuan tertentu sebagai reaksi keadaan yang dinilai, contohnya nilai akreditasi pendidikan
5. *Hubungan antara pengembang nilai dengan keuntungan*:
 - a. Nilai dengan orientasi pada diri sendiri (nilai egosentris), yaitu dapat mempertahankan keberhasilan dan ketentraman.
 - b. Nilai dengan orientasi pada orang lain, yaitu orientasi kelompok:
 - Nilai yang berorientasi pada keluarga hasilnya kebanggaan keluarga
 - Nilai yang berorientasi pada profesi hasilnya nama baik profesi.
 - Nilai yang berorientasi pada bangsa hasilnya nilai patriotisme.
 - Nilai yang berorientasi pada masyarakat hasilnya keadilan sosial.
 - Nilai yang berorientasi pada kemanusiaan yaitu nilai-nilai universal.

Hirarki nilai sangat tergantung dari sudut pandang dan nilai yang menjadi patokan dasar si penilai. Tingkatan atau hirarki nilai akan berbeda antara orang atheis dengan orang religius, demikian juga dengan orang materialis. Bagi orang religius tentu saja nilai-nilai religi akan menempati posisi utama atau tertinggi, sementara bagi orang materialis akan menempatkan nilai materi pada posisi tertinggi. Nilai tentu saja dipandang penting oleh setiap orang. Namun tingkat kepentingan nilai tersebut tidaklah sama, itulah sebabnya nilai memiliki tingkatan, dalam pengertian ada hirarkinya.

Di Indonesia, khususnya pada dekade penataran P4, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaelan (2002:178) hirarki nilai dibagi tiga sebagai berikut:

1. *Nilai dasar* (dalam bahasa ilmiahnya disebut dasar ontologis) yaitu merupakan hakekat, esensi, intisari atau makna yang terdalem dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakekat kenyataan objektif segala sesuatu misalnya hakekat Tuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya.
2. *Nilai instrumental*, merupakan suatu pedoman yang dapat diukur atau diarahkan. Bilamana nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun jikalau nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi ataupun negara maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijaksanaan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Sehingga dapat dikatakan nilai instrumental merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar.
3. *Nilai praksis*, pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata. Sehingga nilai praksis ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental. Nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis itu merupakan suatu sistem dalam perwujudannya tidak boleh menyimpang dari sistem itu

Nilai-nilai pada diri manusia dapat dilihat dari perilaku atau tingkah laku manusia itu sendiri. Rokeach dalam Mulyana (2004: 27) mengistilahkan nilai antara nilai instrumental dan nilai akhir sebagai nilai terminal. Secara kronologis, kejadian nilai pada diri individu mengikuti urutan nilai sebagaimana di atas.

Perilaku yang muncul saat seorang individu memelihara hidup bersih, maka akan berujung pada nilai akhir yang secara internal telah konsisten dimilikinya nilai keindahan atau kesehatan. Oleh karena itu, nilai-nilai instrumental atau nilai perantara akan sering muncul dalam perilaku manusia secara eksternal, sedangkan nilai terminal atau nilai akhir bersifat inherent, tersembunyi di belakang nilai-nilai instrumental yang diwujudkan dalam perilaku.

Berdasarkan urutan kejadian nilai, ada yang membedakan nilai berdasarkan derajat kedekatan nilai dengan pemilik nilai (personal) dan derajat manfaat nilai bagi orang lain (sosial). Sebagai contoh, prestasi akademik yang sering diidentifikasi melalui indikator-indikator perilaku seperti memiliki ranking yang bagus, aktif belajar di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, dan ataupun memperoleh nilai-nilai ujian yang memuaskan. Apabila nilai-nilai interpersonal diidentifikasi melalui indikator-indikator yang lebih bernuansa moral-etik seperti mampu memanfaatkan orang lain, mempunyai rasa empati, solidaritas yang tinggi, ramah, santun dalam berbicara, maka nilai dimaksud sudah masuk pada tataran nilai sosial.

Nilai-nilai yang bersifat personal terjadi dan terkait secara pribadi atas dasar dorongan yang lahir secara psikologis dalam diri seorang individu, sedangkan nilai-nilai sosial, akan lahir disebabkan adanya kontak langsung secara psikologis ataupun sosial dengan dunia luar. Inilah yang disebut sebagai nilai moral (*moral values*)

Nilai juga dapat dikelompokkan menjadi nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif adalah nilai yang didasarkan pada diri sendiri. Seperti sikap suka atau tidak suka terhadap sesuatu perilaku ditentukan atas pertimbangan dan keputusan individu.. Titus (1959) memandang bahwa nilai itu berada pada sisi dalam, tetapi ditampakkan oleh hal-hal yang menyangkut pemenuhan keinginan seorang individu. Oleh karena itu, nilai subyektif menekankan pada fakta bahwa nilai yang diperoleh melalui pertimbangan kebaikan dan keindahan memiliki aneka ragam bentuk yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pilihan individu, kelompok dan usia.

Nilai objektif mencerminkan tingkat kedekatan nilai dengan obyek yang disifatinya. Spranger dalam Mulyana (2004: 33) mengungkapkan bahwa dalam kehidupan manusia sering terjadi konflik antara kebutuhan nilai yang satu dengan nilai lainnya (teoritik, estetik, sosial, politik, dan religius). Kelompok manusia yang memiliki minat kuat terhadap nilai ini adalah para penguasa, ekonom, ataupun orang yang memiliki jiwa materialistik.

Istilah lain yang muncul adalah nilai estetik, nilai politik, sosial, agama. Nilai estetik menempatkan nilai tertinggi pada bentuk dan keharmonisan. Apabila nilai estetik ini dilihat dari sudut pandang subyek yang memilikinya, maka akan muncul kesan indah dan tidak indah. Nilai estetik lebih mencerminkan keragaman, sementara nilai teoretik mencerminkan identitas pengalaman. Dalam arti kata, nilai estetik lebih mengandalkan pada hasil penilaian pribadi seseorang yang bersifat subyektif, sedangkan pada nilai teoretik melibatkan pertimbangan objektif yang diambil dari kesimpulan atas sejumlah fakta kehidupan. Kaitannya

dengan nilai ekonomi, nilai estetik melekat pada kualitas barang atau tindakan yang memiliki sifat indah. Nilai estetik banyak dimiliki oleh para seniman seperti musisi, pelukis, dan taupun perancang model.

Nilai lainnya adalah nilai sosial. Hal tertinggi yang terdapat dalam nilai sosial adalah sikap kasih sayang antarsesama. Oleh karenanya, kadar nilai sosial ini bergerak pada rentang antara kehidupan individualistik dengan sikap altruistik. Sikap sosial, ramah, empati dan tidak *suudzon* atau buruk sangka terhadap orang lain merupakan perilaku yang menjadi kunci keberhasilan dalam meraih nilai sosial.

Adapun hal tertinggi dalam nilai politik adalah kekuasaan. Oleh karena itu, kadar nilai ini bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah kepada pengaruh yang otoriter. Kekuatan merupakan faktor penting yang amat berpengaruh terhadap kepemilikan nilai politik pada setiap individu. Kelemahan merupakan bukti seseorang yang tidak tertarik pada nilai ini. Secara hakiki, sebenarnya nilai ini merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Nilai agama bersumber pada kebenaran hakiki yang datangnya dari Allah, dan cakupannya lebih luas.

Struktur mental manusia dan kebenaran mistik-transendental merupakan dua sisi yang memiliki nilai agama. Oleh karena itu, nilai tertinggi yang harus dicapai manusia adalah kesatuan (*unity*). Kesatuan dimaksud mengandung makna adanya keselarasan di antara semua unsur kehidupan, antara kehendak manusia dengan perintah Sang Pencipta, antara ucapan dan tindakan, dan ataupun antara `itiqad dan perbuatan.

Banyaknya pandangan tentang nilai disebabkan adanya perbedaan dari titik tolak dan sudut pandang masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta hierarki nilai. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak usaha untuk menggolong-golongkan nilai tersebut dan penggolongan tersebut amat beranekaragam, tergantung pada sudut pandangan dalam rangka penggolongan tersebut.

Max Sceler dalam Darmadi (2007:68) mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan (*die wertreihe des angenehmen und unangenehmen*) yang menyebabkan orang senang atau menderita.
2. Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (*werte des vitalen fühlens*) misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum.
3. Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.

4. Nilai- nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapat modalitas nilai dari suci dan tak suci (*wermodalitas des heiligen ung unheiligen*). Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Menurut Darmadi (2007:71-72) dalam kaitannya dengan derivasi atau penjabarannya maka nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai fraksis.

- a. Nilai Dasar

Walaupun nilai memiliki sifat abstrak artinya tidak dapat diamati melalui indera manusia, dalam realisasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersipat nyata (praksis). Namun demikian, setiap nilai memiliki dasar (dalam bahasa ilmiahnya di sebut dasar konotologis), yang merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersipat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu misalnya hakikat Tuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya.

Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai tersebut bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah kausa prima (sebab pertama), sehingga segala sesuatu diciptakan (berasal) dari Tuhan. Demikian juga jika nilai dasar berkaitan dengan hakikat manusia, maka nilai-nilai tersebut bersumber pada hakikat kodrat manusia sehingga jika nilai-nilai dasar itu dijabarkan dalam norma hukum maka diistilahkan hak dasar (hak asasi). Demikian juga hakikat nilai dasar itu dapat berlandaskan pada hakikat sesuatu benda, kuantitas, aksi, relasi, ruang maupun waktu. Sehingga nilai dasar dapat disebut sebagai sumber norma yang

pada gilirannya dijabarkan atau direalisasikan dalam suatu kehidupan yang bersipat praksis. Konsekuensinya walaupun dalam aspek praksis dibeda-beda namun secara sistematis tidak dapat bertentangan dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran norma serta realisasi praksis.

b. Nilai Instrumental

Untuk dapat direalisasikan dalam suatu kehidupan praktis, maka nilai dasar tersebut di atas memiliki formasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Nilai instrumental inilah yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Bilamana nilai instrumental tersebut berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi ataupun negara maka nilai-nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijakan atau strategi yang bersumber pada nilai dasar, sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu eksplisitas dari nilai dasar.

c. Nilai Praksis

Nilai praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata, sehingga nilai praksis ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental. Dapat juga dimungkinkan berbeda-beda wujudnya. Namun demikian, tidak bisa menyimpang atau bahkan tidak dapat bertentangan. Oleh karena itu, nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis itu merupakan suatu sistem perwujudannya tidak boleh menyimpang dari sistem tersebut.

C. Hakikat dan Tujuan Pendidikan Nilai

Mulyana (2004:119) mengartikan pendidikan nilai sebagai penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Dalam pengertian yang hampir sama, Mardiatmadja dalam Mulyana (2004:119) mendefinisikan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan Nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, akan tetapi mencakup keseluruhan program pendidikan.

Adapun Hakam (2000:05) mengungkapkan bahwa pendidikan nilai adalah pendidikan yang mempertimbangkan objek dari sudut moral dan sudut pandang non moral, meliputi estetika, yakni menilai objek dari sudut pandang keindahan dan selera pribadi, dan etika yaitu menilai benar atau salahnya dalam hubungan antarpribadi.

Dari definisi di atas, dapat dimaknai bahwa pendidikan nilai adalah proses bimbingan melalui suritauladan pendidikan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan pribadi peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara.

Mulyana (2004:119) mengungkapkan bahwa secara umum, pendidikan nilai dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam

kehidupan. Untuk sampai pada tujuan dimaksud, tindakan-tindakan pendidikan yang mengarah pada perilaku yang baik dan benar perlu diperkenalkan oleh para pendidik.

Sasaran yang hendak dituju dalam pendidikan nilai adalah penanaman nilai-nilai luhur ke dalam diri peserta didik. Berbagai metoda pendidikan dan pengajaran yang digunakan dalam pendekatan lainnya dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran pendidikan nilai. Ini penting, untuk memberi variasi kepada proses pendidikan dan pengajarannya, sehingga lebih menarik dan tidak membosankan.

Djahiri (1992) mengemukakan delapan pendekatan dalam pendidikan nilai atau budi pekerti, yaitu :

1. *Evocation*; yaitu pendekatan agar peserta didik diberi kesempatan dan keleluasaan untuk secara bebas mengekspresikan respon afektifnya terhadap stimulus yang diterimanya.
2. *Inculcation*; yaitu pendekatan agar peserta didik menerima stimulus yang diarahkan menuju kondisi siap.
3. *Moral Reasoning*; yaitu pendekatan agar terjadi transaksi intelektual taksonomik tinggi dalam mencari pemecahan suatu masalah.
4. *Value clarification*; yaitu pendekatan melalui stimulus terarah agar siswa diajak mencari kejelasan isi pesan keharusan nilai moral.
5. *Value Analysis*; yaitu pendekatan agar siswa dirangsang untuk melakukan analisis nilai moral.

6. *Moral Awareness*; yaitu pendekatan agar siswa menerima stimulus dan dibangkitkan kesadarannya akan nilai tertentu.
7. *Commitment Approach*; yaitu pendekatan agar siswa sejak awal diajak menyepakati adanya suatu pola pikir dalam proses pendidikan nilai.
8. *Union Approach*; yaitu pendekatan agar peserta didik diarahkan untuk melaksanakan secara riil dalam suatu kehidupan.

Sementara sasaran pendidikan nilai adalah bagaimana agar individu *to be human being* dan *to be human life*. Djahiri dalam Hakam (2006:73) mengungkapkan bahwa :

1. *Humanizing* (memanusiakan manusia sehingga manusiawi, manusia yang utuh, kaffah) yaitu dengan proses pembinaan, pengembangan dan perluasan seperangkat nilai-norma dan norma ke dalam tatanan nilai dan keyakinan (*value and belief system*) manusia secara layak and manusiawi.
2. *Empowering* (memberdayakan manusia sebagai makhluk yang menyadari memiliki sejumlah potensi dan menyadari keterbatasannya) dengan cara (1) *knowing the what dan knowing the why* (2) *apreciate mean and end* (3) *experiencing, acting and behaving*.
3. *Civilizing*, baik dalam pola pikir, pola dzikir dan pola prilaku.

Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan nilai pada jalur pendidikan formal. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka tentang pendekatan dan modus pendidikannya. Sebagian yang lain menyarankan

penggunaan pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman nilai-nilai sosial tertentu dalam diri siswa.

Pada prinsipnya, pembelajaran afektif atau pendidikan nilai moral secara praktis sudah ada sejak peradaban (budaya) dan kepercayaan/agama manusia tumbuh, berkembang dan dilestarikan turun-temurun. Hanya saja sebagai rekayasa ilmu untuk pendidikan yang sistematis, konseptual-terstruktur dan terarah-terkendali serta menjadi kajian khusus merupakan hal baru. Pada masyarakat Indonesia pendidikan baru dikenal sejak tahun 1976-an, bahkan banyak para pakar pendidikan yang kurang yakin akan keberhasilan pencarian sosok pendidikan nilai dan pola pembelajarannya.

Menurut Darmadi (2007:135) secara pedagogis, gambaran karakteristik proses pembelajaran nilai dapat dipaparkan sebagai berikut :1) Dunia afektif adalah bagian totalitas diri manusia (internal) maupun dunia di luar manusia (lingkungan kehidupannya). 2) masalah pembinaan nilai-moral adalah masalah kejiwaan, oleh karenanya postulat-postulat mengenai hal tersebut harus kita fahami. 3) proses pendidikan nilai hanya bisa terjadi apabila teori dan/atau prinsip mengenai hal ini dipahami dan diterapkan sejak kegiatan perencanaan program pembelajaran sampai akhir proses pembelajaran. 4) proses pendidikan nilai memerlukan memerlukan sejumlah prasyarat yakni prasyarat kesiapan dan keterbukaan dan kemampuan afektual siswa, suasana, lingkungan, kemampuan/pemahaman guru dan pola prosedurnya. 5) keberhasilan proses dan hasil KBS pendidikan nilai tergantung pada kejelasan target harapan nilai-moral yang harus dipersonalisasi dan kejelasan bahan ajar serta kehandalan dan

keterjangkauan media pembelajarannya. 6) kemahiran guru dalam mengemas isi pesan dan tampilannya didepan kelas. 7) pemahan dan penerapan berbagai azas pendidikan (Humanistic, CBSA, Komunikatif, Ekologis dan lain-lain). 8) sasaran dan pola proses pendidikan nilai harus utuh atau bulat berkesinambungan antar domain taksonomik. 9) target harapan nilai-moral sesuai dengan isi pesan yang di tuntutan dalam pembelajaran itu sendiri. 10) keharusan mengaitkan interaksi KBS dengan lingkungannya. 11) pembinaannya dilakukan sedini mungkin, bertahap, sikuensial dan terus-menerus. 12) bersifat individual dan dengan proses terpadu yang bervariasi.

D. Hakikat Nilai Disiplin

1. Pengertian dan Makna Konsep Disiplin

Salah satu uapaya yang dilakukan oleh para pengelola pesantren dalam meningkatkan proses belajar dan mengajar di pondok pesantren untuk mencapai tujuan pendidikan dengan baik adalah disiplin. Disiplin berasal dari kata *dicipulus* yang berarti “student” atau “pupil” (Mc Phil,1982:130). Yang berarti seseorang yang menerima intruksi dari yang lain, khususnya seseorang yang menerima intruksi dari gurunya yang membantu perkembangan atau diartikan sebagai pengikut (*follower*).

Ada dua konsep mengenai disiplin yaitu positif dan negatif, yang positif sama dengan pendidikan dan konseling, yaitu menekankan perkembangan dari dalam yang berbentuk *self control* (pengendalian diri). Disiplin yang positif ini mengarahkan pada motivasi dari dalam diri sendiri. Sedangkan yang negatif

berhubungan dengan control seseorang berdasarkan pada otoritas luar yang biasanya dilakukan secara terpaksa atau karena takut hukuman (*punishment*).

Disiplin selalu mengacu kepada peraturan, norma atau batasan-batasan tingkah laku dengan penamaan disiplin. Individu diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan norma. Pelaksanaan disiplin di pondok pesantren harus atas dasar kesadaran diri sendiri, tidak ada paksaan dari manapun dan hal ini dilaksanakan sebagai ibadah dalam melaksanakan ajaran Islam.

Untuk menganalisa keadaan ini, Djamari (1985:393-394) berpendapat bahwa ketaatan santri kepada kyai didasari oleh nilai rohaniyah, dengan keyakinan bahwa menentang kyai selain dianggap tidak sopan, juga bertentangan dengan ajaran agama. Ketaatannya tidak semu, tetapi atas dasar kesadaran dan keikhlasan karena Allah.

Dari beberapa pendapat di atas bias ditarik kesimpulan ada beberapa konsep pokok dalam disiplin yang berhubungan dengan pengertian dan kecenderug-kecenderungan disiplin sebagai berikut:

Dalam kamus bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1985:255), Disiplin diartikan dengan: 1). Latihan watak supaya sejalan dengan perbuatan selalu mentaati tata tertib di sekolah dan kemiliteran, 2). ketaatan pada peraturan dan tata tertib. Kedua pengertian ini mengisyaratkan bahwa kata disiplin memang mengandung banyak arti. Disiplin dapat diartikan sebagai kesediaan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sebagaimana dikemukakan Arikunto (1990:14) bahwa disiplin merupakan kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan dan tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada di hatinya.

Disiplin berasal dari bahasa latin “Disciplina” yang menunjukkan kepada kegiatan belajar mengajar. Istilah tersebut juga hampir sama dengan istilah dalam bahasa Inggris “*Disciple*” yang berarti mengikuti orang untuk belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Istilah lainnya dalam bahasa Inggris adalah “*Discipline*” yang artinya: 1). Tertib, taat, atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, kendali diri; 2). Latihan membentuk, meluruskan dan menyempurnakan sesuatu sebagai kemampuan mental dan karakter moral; 3). Hukuman yang diberikan untuk melatih atau memperbaiki; 4). Kumpulan atau system peraturan-peraturan bagi tingkah laku (*Mac Millan Dictionary*, dalam Tulus Tu’u, 2004:31).

Rahman (1999;68) mengartikan disiplin sebagai upaya mengendalikan diri dan sikap mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya. Adapun Prijodarminto (1994:23) mengatakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban. Karena sudah menyatu dengan dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya. Nilai-nilai kepatuhan telah menjadi bagian dari perilaku dalam kehidupannya. Sikap dan perilaku ini tercipta melalui proses binaan pada keluarga, pendidikan dan pengalaman atau pengenalan dari keteladanan dan lingkungannya.

Soeharto (1996:8) membagi disiplin menjadi tiga kelompok, yaitu disiplin sebagai latihan, disiplin sebagai hukuman dan disiplin sebagai alat pendidikan.

- a. Disiplin sebagai latihan, untuk menuruti kemauan seseorang jika dikatakan melatih untuk menuruti, berarti jika seseorang memberi perintah, orang lain akan mengikuti perintah itu.
- b. Disiplin sebagai hukuman, bila seseorang berbuat salah, maka harus dihukum. Hukuman itu sebagai upaya mengeluarkan yang jelek dari dalam itu sehingga menjadi baik.
- c. Disiplin sebagai alat pendidikan. Seseorang memiliki potensi untuk berkembang melalui interaksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan realisasi dirinya. Dalam interaksi tersebut, anak belajar tentang nilai-nilai sesuatu. Proses belajar dengan lingkungan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai tertentu tersebut telah membawa pengaruh dan perubahan perilakunya. Perilaku ini berubah tertuju pada arah yang sudah ditentukan oleh nilai-nilai yang sudah dipelajari. Jadi fungsi belajar adalah mempengaruhi dan mengubah perilaku seorang anak. Semua perilaku merupakan hasil sebuah proses belajar.

Sementara Prijodarminto (1994:23) berpendapat bahwa disiplin mempunyai tiga aspek, yaitu:

- a. Sikap mental (*mental attitude*) yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak.

- b. Pemahaman yang baik mengenai system aturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan akan aturan, norma, kriteria dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan (sukses).
- c. Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib.

Hubungannya dengan disiplin Wahab (1998:47) memandang bahwa disiplin dapat dilihat sebagai konsep dan sebagai nilai;

- a. Disiplin sebagai konsep, disiplin merupakan nama konsep kepatuhan menjalankan aturan atas dasar kesadaran dan rasa wajib, contohnya tepat waktu dalam segala hal, kebalikannya selalu lambat dalam segala hal. Ciri-cirinya tahu aturan, tahu waktu, tahu tugas, dan tanggungjawab dan melakukannya sesuai aturan. Kedisiplinan terbentuk karena proses pembiasaan sesuatu berbuat baik atas dasar kesadaran diri dan penguatan dari lingkungan serta didukung oleh aturan atau norma tertentu.
- b. Disiplin sebagai nilai, disiplin adalah sebagai bentuk sikap dan perilaku sadar aturan sangat didambakan oleh siapapun karena hal itu merupakan motor penggerak ketertiban

Konsep disiplin itu selalu merujuk kepada peraturan, norma atau batasan tingkah laku. Dengan penanaman disiplin, individu diharapkan dapat berperilaku yang sesuai dengan norma tersebut. Sesuai dengan pernyataan ini, Crow dan Crow (1980:274) mengemukakan sebagai berikut:

“Implicit in the concept of discipline are (1) the presence of rules, regulations, standard, or order conduct the determiners, and (2) the control of impulsive overt expressions of personal the desire, interest, or ambition in accordance with appropriate and acceptable societal standards”.

Pengertian di atas mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan disiplin itu senantiasa merujuk kepada peraturan atau patokan-patokan yang menjadi untuk pengontrolan terhadap tingkah laku supaya sesuai dengan patokan-patokan yang berlaku atau diterima masyarakat.

Seseorang yang disiplin dapat dilihat dari ketaatannya untuk melaksanakan peraturan yang sederhana sampai ke peraturan yang kompleks untuk lebih lancarnya pelaksanaan disiplin, memang harus benar-benar atas dasar kesadaran sendiri, tidak ada unsur paksaan dari orang lain.

Manakala peraturan atau norma itu telah menjadi milik individu dalam arti telah memahami, menghayati dan menjadikan norma itu sebagai pedoman perilakunya, berarti ia telah mampu menyerap atau menginternalisasi nilai berarti dia telah memiliki disiplin dalam diri.

Dari beberapa uraian tentang disiplin, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban kepada suatu ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau kelaziman-kelaziman yang berlaku.

2. Teori dan Pendekatan Pembinaan Disiplin

Terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penanaman nilai disiplin siswa di persekolahan. Power (1982:340-341) mengungkapkan beberapa teori tentang disiplin yang diantaranya adalah *theory of no control*, *theory of strict control*, *theory of value clarification*, dan *theory moral behavioral modification*.

Teori pertama yakni teori yang tidak menggunakan kontrol dalam strategi pembinaan disiplin siswa di sekolah. Teori ini menyatakan bahwa anak memiliki kemampuan sendiri dalam menuntun dirinya. Oleh karena itu, anak bebas dalam menentukan sendiri perilaku mereka. Kebalikannya adalah teori yang keras, dimana diakhiri dengan praktek-praktek modifikasi perilaku atau terapi medis.

Teori lainya yakni teori klarifikasi nilai, teori ini menjelaskan ketegangan dan perselisihan yang melahirkan perilaku sosial masuk ke sekolah dengan nilai-nilai yang tidak dapat diterima dan merintanggi kegiatan pengajaran, karena perbedaan substansi dan tidak dipahaminya nilai-nilai yang diadopsi sekolah oleh peserta didik.

Teori selanjutnya adalah teori perilaku moral yang menyatakan bahwa perilaku dapat dipelajari dan disiplin berdimensi kognitif. Disiplin berhasil kalau mendukung iklim yang kondusif untuk pengajaran. Teori perkembangan moral Kohlberg memusatkan pada pertimbangan moral yang tujuan akhirnya adalah perkembangan sistem nilai moral pribadi. Sedangkan teori modifikasi perilaku dalam membina disiplin sekolah didasarkan atas asumsi bahwa semua perilaku manusia dihasilkan dari *conditioning* dan *reinforcement*.

Selain teori disiplin yang diungkapkan Power di atas, Palardy dan Mundrey (1975:315) mengemukakan empat pendekatan dasar (*four basic approaches to discipline*) terhadap disiplin yakni *the permissive, the authoritarian, the behavioristic dan diagnostic*.

Pembinaan disiplin menggunakan pendekatan permissive yakin bahwa manakala para siswa benar-benar dilibatkan sepenuhnya sesuai dengan tujuan kurikulum, siswa tidak akan berperilaku buruk dan dengan memberikan kondisi-kondisi yang benar, maka semua anak akan selalu berperilaku baik.

Sementara pendekatan authoritarian maksudnya dalam pelaksanaan disiplin memiliki banyak peraturan kelas yang telah didesain dan dikomunikasikan dengan suatu cara pada siswa. Sehingga mereka mengetahui bahwa mereka memiliki status yang rendah. Pendekatan ini berasumsi bahwa banyak peraturan adalah lebih baik dan siswa harus mengetahui penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan-peraturan tersebut. Guru semestinya bertindak tegas terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah.

Adapun pendekatan lainnya yaitu pendekatan behavioristik, dalam pelaksanaannya untuk menegakkan disiplin memberikan garis pedoman hanya untuk mencegah keadaan yang muncul dari masalah disiplin. Kunci untuk modifikasi perilaku tindakan menggunakan hukuman dan ganjaran manakala siswa berprestasi.

Pendekatan terakhir yaitu pendekatan diagnostik, pendekatan ini berasumsi bahwa dapat menjadi akibat-akibat yang abadi terhadap problem-problem perilaku, kecuali setelah kasus-kasus mereka ditemukan dan ditangani.

Pendekatan-pendekatan dalam penanaman nilai disiplin lainnya dikemukakan oleh Kourilsky dan Quaranata (1987:31). Ia mengemukakan tiga pendekatan yakni *behavior modification approach*, *assertive discipline approach*, dan *psychoanalytic approach*

Pendekatan *behavior modification* memfokuskan pada pembentukan perilaku yang dilakukan melalui berbagai bentuk *reinforcement*. Dengan demikian, perilaku disiplin dibentuk oleh konsekuensi-konsekuensi dari perilaku itu sendiri. Pada waktu *reinforcer* (guru) mendukung perilaku disiplin siswa maka perilaku tersebut cenderung diulang. Sedangkan *punishment* dan *negative reinforcement* cenderung melemahkan perilaku atau meniadakan perilaku indiscipliner.

Adapun pendekatan *assertive discipline* menekankan kepada disiplin yang tegas, guru dianjurkan bersifat tegas di kelas sehingga memunculkan rasa tanggung jawab pada diri siswa terhadap perilakunya, sebab siswa diharapkan menyadari konsekuensi-konsekuensi negatif maupun positif yang diakibatkan dari perilaku tersebut. Konsekuensi negatif akan menghilangkan hak-hak istimewa atau pelayanan yang ditawarkan sekolah. Kebalikannya konsekuensi positif akan menghasilkan sebuah penghargaan atau *reward*.

Pelaksanaan pendekatan *assertive discipline* akan lebih efektif kalau guru mengkomunikasikan konsep-konsep disiplin yang dikehendaki secara jelas dan diterapkan secara konsisten dalam sebuah sistem. Jika siswa sudah merasa jelas tentang perilaku yang diharapkan di kelas, maka secara aktif hal tersebut menjadi aturan yang berlaku pada kelompoknya. Tapi akan menjadi kurang efektif kalau

guru bersifat spontan tanpa diikuti prosedur yang konsisten, karena siswa tidak akan berpartisipasi dalam pelaksanaan pendekatan ini.

Manakala guru berusaha mencari apa yang menjadi penyebab *misbehavior* siswa, maka dengan demikian guru sudah melakukan pendekatan *psychoanalytic*. Dengan cara demikian guru mencoba mencari dan menemukan motivasi dan sikap-sikap dasar yang mempengaruhi behavior siswa dan menemukan pula karakteristik-karakteristik emosional, sosial dan psikologis yang dibutuhkan oleh setiap siswa. Guru lebih berperan sebagai konselor daripada membuat aturan atau memberi *reward*. Tujuan umum dari pendekatan *psychoanalytic* adalah membantu siswa memperoleh *insight* pola-pola perilaku kognitif.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pendekatan *behavior modification* merupakan pendekatan yang paling tegas dalam mendisiplinkan siswa melalui *reinforcement* yang bersifat positif (*reward*) dan negatif (*punishment*). Pendekatan *psychoanalytic* dapat dianggap sebagai pendekatan yang paling lunak, sebab dalam mengupayakan perilaku disiplin siswa pendekatan ini melakukannya melalui pengenalan maupun pencarian penyebab siswa berperilaku. Sedangkan pendekatan *assertive discipline* dapat dikatakan berada diantara kedua pendekatan sebelumnya, sebab pendekatan ini pada satu sisi menghendaki ketegasan guru dalam mendisiplinkan perilaku siswa melalui komitmen-komitment antara guru dengan siswa dan secara konsisten harus diaati oleh kedua pihak, dan di sisi lainnya guru berupaya menumbuhkan *self discipline* dari diri siswa itu sendiri.

3. Disiplin di Lingkungan Pesantren

Eksistensi pondok pesantren dalam menyikapi perkembangan zaman, tentunya memiliki komitmen untuk tetap menyuguhkan pola pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang handal, kekuatan otak (berpikir), hati (keimanan) dan tangan (keterampilan), merupakan modal utama untuk membentuk pribadi santri yang mampu menyeimbangkan perkembangan zaman. Berbagai kegiatan keterampilan kerja adalah upaya untuk menambah wawasan santri di bidang ilmu sosial, budaya dan ilmu praktis, merupakan salah satu terobosan konkret untuk mempersiapkan individu santri di lingkungan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di lingkungan masyarakat, maka pondok pesantren harus berani tampil dan mengembangkan dirinya sebagai pusat keunggulan. Pondok pesantren tidak hanya mendidik santri agar memiliki ketangguhan jiwa, jalan hidup yang lurus, budi pekerti yang mulia, tetapi juga santri yang dibekali dengan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Upaya mencapai tujuan tersebut di atas, para santri harus dibekali nilai-nilai keislaman dan keterampilan. Hal ini diwujudkan melalui tatakrama dan tata tertib yang diberlakukan di pesantren tersebut. Dengan diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut, para santri memiliki disiplin yang tinggi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena mengisi dan membekali kognitif anak didik/santri hanya sebagian kecil saja dari tujuan pendidikan. Untuk itu Pesantren Persatuan Islam No. 67 Benda Kota Tasikmalaya memberlakukan disiplin di lingkungan pesantren sebagai bagian yang urgen/krusial untuk membina mental, karakter atau moralitas agar tertanam dalam diri santri nilai-nilai yang beradab yaitu kekuatan iman dan ilmu pengetahuan.

E. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren.

1. Sejarah Pondok Pesantren

Sejarah berdirinya pesantren belum diperoleh keterangan yang pasti. Menurut Departemen Agama, bahwa pesantren tertua didirikan pada tahun 1062 atas nama pesantren Jan Tampes II di Pamekasan Madura. Tetapi hal ini diragukan, karena tentunya ada pesantren Jan Tampes I yang lebih tua dan dalam buku Departemen Agama tersebut banyak dicantumkan pesantren tanpa dicantumkan tahun pendirian. Jadi, mungkin mereka memiliki usia yang lebih tua. Kecuali itu tentunya pesantren didirikan setelah islam masuk ke Indonesia.

Diduga besar kemungkinan islam telah diperkenalkan kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 M oleh para musafir dan pedagang muslim, melalui jalur perdagangan dari teluk Persia dan Tiongkok yang telah dimulai sejak abad ke-5 M, selanjutnya abad ke-11 dapat dipastikan islam telah masuk ke Kepulauan Nusantara melalui kota-kota pantai. Hal ini terbukti dengan ditemukannya: (a) Batu nisan atas nama Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 474 H atau tahun 1082 M di Leran Gresik. (b) Makam Malikus Saleh di Sumatra Bertarikh abad ke-13 M. (c) Makam wanita islam bernama Tuhar Amisuri di Barus, dan Pantai Barat pulau Sumatra bertarikh 602 H.

Bukti-bukti sejarah telah menunjukkan bahwa penyebaran dan pendalaman islam secara intensif terjadi pada masa abad ke-13 M sampai akhir abad ke-17 M, pada masa itu berdiri pusat-pusat kekuasaan dan studi Islam, seperti di Aceh, Demak, Giri, Ternate/Tidore, dan Gowa Tallo di Makasar. Dari pusat-pusat inilah kemudian islam tersebar di seluruh pelosok Nusantara melalui para pedagang,

wali, ulama, mubaligh, dan sebagainya dengan mendirikan pesantren, dan surau. Sejak abad ke-15, islam praktis telah menggantikan dominasi ajaran Hindu, dan sejak abad ke-16 melalui kerajaan Islam pertama, yaitu Demak, seluruh Jawa telah dapat diislamkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pesantren telah dimulai di bumi nusantara ini dalam periode abad ke-13 -17 M, dan di jawa terjadi pada abad ke-15-16 M. Melalui data sejarah masuknya islam di Indonesia yang bersifat global atau makro tersebut sangat sulit menunjuk dengan tepat tahun berapa dan dimana pesantren pertama didirikan. Namun, dapat dihitung bahwa sedikitnya pesantren telah ada sejak 300-400 tahun yang lalu.

Dengan usianya yang paling panjang ini, kiranya sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa ia memang telah menjadi milik budaya bangsa dalam bidang pendidikan dan telah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan karenanya cukup pula alasan untuk belajar daripadanya. Model pesantren di Indonesia ada yang mengemukakan berasal dari kebudayaan Hindu-Budha, seperti yang diungkapkan disini bahwa pesantren bermula pada masa-masa terakhir kerajaan Majapahit dan mulainya berkembang agama islam di Indonesia pada umumnya dan di pulau Jawa khususnya, yakni pada akhir abad 15).

Dalam kehidupan beragama Hindu dikenal pengelana-pengelana yang digelari hajar atau ajar. Para hajar mengembara dari satu tempat ketempat lain untuk mengokohkan agama Hindu. Pengembaraan itu makin lama makin berkembang setelah para hajar membangun padepokan-padepokan dan mereka menetap disitu. Mulai saat itu datanglah para cantrik (santri) di padepokan-

padepokan untuk menuntut ilmu. Keluarga mengirimkan warganya kepadepokan untuk menuntut ilmu yang tidak dapat dibekalkan oleh orang tua melalui pendidikan keluarga. Para hajar memikul sebagian tugas didik yang tidak mampu dilaksanakan oleh orang tua di dalam keluarga.

Dari tujuan, bahan, cara-cara, tempat dan waktu yang digunakan dipadepokan untuk menyelenggarakan pendidikan, terdapat banyak hal yang bersifat resmi. Pendidikan di padepokan dilaksanakan dengan memberlakukan peraturan-peraturan resmi yang harus dipatuhi secara rutin. Dibandingkan dengan orang tua yang masih mempunyai keleluasaan dalam menyelenggarakan pendidikan keluarga, para hajar sudah mengatur dan meresmikan banyak hal dalam menyelenggarakan pendidikannya. Penyelenggaraan pendidikan dengan memberlakukan peraturan-peraturan resmi seperti itu disebut pendidikan formal.

Pada lembaga-lembaga pendidikan formal, dalam hal ini adalah padepokan-padepokan, pendidikan diwujudkan sebagai proses pengajaran. Terdapat perbedaan hakiki antara proses konformasi dan proses pengajaran. Proses konformasi menuntut dari yang dididik suatu kepatuhan yang mutlak, sedangkan proses pengajaran banyak mengandung pesan dan dorongan untuk mempertimbangkan segala sesuatu dalam rangka mengambil keputusan sendiri. Sebab itu tidak heran kalau dari proses pengajaran dapat lahir pribadi-pribadi mandiri yang mengembangkan berbagai aliran ilmu. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan formal di Eropa bermula dari tersedianya waktu senggang (*scola*) pada orang-orang kaya Athena dalam masa Yunani Kuno. Karena kaya, mereka tidak perlu menggunakan waktu untuk mencari nafkah. Untuk mengisi

waktu senggang itulah mereka mendatangi guru dan mempelajari buku-buku kesusastraan yang berisi ajaran-ajaran filsafat.

Dibawah pemerintahan raja Solon (640-559 sb M), sekolah-sekolah khusus untuk laki-laki mulai ditata dengan peraturan-peraturan yang mengikat. Mulai saat itulah lahir lembaga-lembaga formal yang kemudian disebut sekolah. Sekolah model Eropa dikenal di Indonesia sejak abad ke 16, mula-mula sebagai sekolah agama Kristen dan kemudian sebagai sekolah yang menyiapkan tenaga-tenaga pegawai bagi pemerintah Kolonial. Dalam rangka memenuhi kepentingan tenaga kerja bagi kantor-kantor pemerintah dan perusahaan swasta, pemerintah Kolonial hanya mengakui tamatan sekolah sebagai tenaga kerja yang kualifikasi.

Dengan cara pengakuan seperti itu, makin lama makin terdesaklah pendidikan formal dari lembaga-lembaga pendidikan pesantren, yaitu lembaga-lembaga pendidikan formal Indonesia sebagai hasil pertumbuhan dan perkembangan padepokan-padepokan abad ke 15. Sekolah, bagaimanapun memang mempunyai peraturan-peraturan yang sifatnya jauh lebih resmi dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di pesantren. Atas dasar kenyataan seperti itu, ada pihak-pihak yang menyebut lembaga pendidikan formal asli Indonesia sebagai lembaga pendidikan nonformal.

Dalam perkembangan selanjutnya sampai dengan abad ke 20, batas-batas formal dan nonformal dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi kabur, pesantren, sekolah, kursus, pusat latihan keterampilan dan lembaga-lembaga pendidikan lain telah diatur dengan peraturan-peraturan resmi dan proses pengajaran digunakan sebagai perwujudan upaya pendidikan. Akhirnya,

pendidikan nonformal diartikan sebagai pendidikan luar sekolah, walau didalam system pendidikan telah dikonseptualisasikan komponen pendidikan informal atau pendidikan keluarga, pendidikan formal atau pendidikan sekolah dan pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat sebagai upaya yang padu. Dalam perkembangan selanjutnya, maka pendidikan formal cenderung diartikan sebagai lembaga pendidikan yang tamatannya di akui secara resmi oleh pemerintah untuk mendapatkan *civil effect* tertentu apabila mereka bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan (Depdikbud,1982: 7-9). Kajian tentang sejarah model pesantren yang diungkapkan diatas, bahwa pesantren yang dikembangkan dewasa ini ada kemungkinan berasal dari kebudayaan Hindu Budha.

Selanjutnya Rahardjo (1957:32) mengemukakan model pesantren ini berakar pada sejarah Nabi sendiri. Sebelum Nabi menyiarkan agama Allah secara terang-terangan kepada masyarakat luas setelah menerima wahyu, ia terlebih dahulu membentuk kelompok pengajian, mula-mula mengambil tempat disuatu bukit diluar kota Mekah, tetapi kemudian berpindah kerumah pemuda bernama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam berjumlah 40 orang yang disebut *assabiqunal awwalun*. Mereka yang dididik dengan cara yang mirip dengan asal usul model pesantren yang kemudian membawa nilai-nilai baru yang mengantar dunia Arab menuju keperadaban besar, pusat peradaban dunia pada bagian bumi yang paling maju diwaktu itu.

Penanaman pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Garut, mengambil dari nama seorang pemuda yang termasuk salah satu sahabat Rasulullah saw yang tergolong *assabiqunal awwalun* yaitu sahabat Al-Arqam.

Kutipan perjalanan pesantren di Indonesia di atas, dari para pakar sejarah tentang pesantren yang tersebar di wilayah nusantara, istilahnya berbeda disetiap wilayah dan di Jawa mengistilahkan dengan pesantren, sedangkan ditataran pasundan menyebutnya “pondok” kemudian berubah menjadi pondok pesantren atau peasantren tidak diawali dengan kata pondok. Sekarang istilah pesantren sudah menyebar ke setiap wilayah di nusantara, namun adapula yang menyebutkan untuk daerah Jawa Barat dengan istilah “padepokan”. Sama halnya dengan istilah “kiyai” atau “ajengan” sebagai pengasuh pesantren. Istilah kiyai sudah dipakai oleh semua kalangan umat Islam yang bergerak dalam bidang keagamaan. Bahkan menurut kabar yang mutawatir sebutan “ajengan” ditataran Pasundan, kali ini disinyalir untuk pemuka agama Islam dikelompoknya yang ada di wilayah Pasundan selain sebutan kiyai ada pula sebutan “Aa-Akang-Kang”(sebagai wacana yang perlu diteliti lebih lanjut). Yang jelas pondok pesantren merupakan suatu lembaga keagamaan yang mengajarkan, mendakwahkan ilmu-ilmu *ad-Din al-Islam* untuk umat islam pada waktu itu dan generasi yang akan datang.

2. Pengertian Pesantren

Istilah pondok berasal dari bahasa Arab *Funduq* yang berarti hotel, asrama, rumah dan tempat tinggal sederhana (Yasmadi, 2005:62), sementara istilah pesantren terdapat perbedaan dalam memaknai khususnya berkaitan dengan asal-usul katanya. Di samping itu, secara etimologis pesantren berasal dari kata santri, bahasa Tamil yang berarti guru mengaji, sedang C.C Berg berpendapat asal katanya *shastri* (bahasa India) yang berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu (Dhofier, 1982:18).

Fakta lain yang menunjukkan bahwa pondok pesantren bukan berasal dari tradisi Islam adalah tidak ditemukannya lembaga pondok pesantren di negara-negara Islam lainnya. Menurut Madjid (1997:19-20) terdapat dua pendapat berkaitan dengan istilah Pesantren. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa "Santri" berasal dari kata *sastri*, sebuah kata dari bahasa Sanskerta yang artinya melek huruf; *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan *santri* sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa dari kata *cantrik*, berarti seseorang yang selalu mengikuti guru kemana guru itu menetap. Dhofier (1982:18) berpendapat bahwa kata *santri* berasal dari bahasa India yang berarti orang yang tahu buku-buku suci agama, atau secara umum dapat diartikan buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.

Sementara itu, Steenbrink (1994:20) menyatakan sebagai berikut bahwa secara terminologis dapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren, dilihat dari segi bentuk dan sistemnya, berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa. Setelah Islam masuk dan tersebar di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil alih oleh Islam.

Pendapat di atas pada dasarnya tidak menunjukkan suatu kontradiksi, melainkan lebih bersifat saling melengkapi, sehingga meskipun terdapat perbedaan dalam melihat asal-usul kata Pesantren, namun tidak terdapat perbedaan pendidikan yang mengajarkan pada siswa membaca kitab-kitab agama (agama Islam), dan para siswanya tinggal bersama guru mereka.

Pesantren atau pondok merupakan lembaga tempat berkembangnya sistem pendidikan nasional. Dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia. Sebab lembaga yang serupa pesantren ini sebenarnya sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu-Budha. Sehingga islam tinggal mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada. Tentunya hal ini tidak berarti mengecilkan peranan islam dalam memelopori pendidikan di Indonesia (Majid, 1997: 3)

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan keislaman tidak terlepas dari keasliannya sampai sekarang, sehingga dapat dibedakan dengan lembaga pendidikan yang lainnya, karena mempunyai ciri khas yaitu keteladanan, ketaatan, dan pergaulan yang bernuansa islam.

3. Unsur-unsur Pesantren

Pondok pesantren merupakan sistem pendidikan karena memiliki unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan pondok pesantren tersebut menurut Dhofier (1982:44) terdiri atas kyai, santri, kitab kuning, masjid dan pondok. Begitu pula menurut Daulani (2001:14) unsur-unsur pendidikan pondok pesantren terdiri atas kyai, santri, pondok, masjid, dan pengajaran ilmu-ilmu agama. Dengan demikian pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Unsur pesantren tradisional pada umumnya meliputi 1) Kyai (ajengan), dan santri, dan 2) Perangkat keras: mesjid, pondok, rumah kyai. Sedangkan unsur pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kyai (ajengan), siswa/santri, ustadz/*mu'allim*/guru, kepala sekolah/rector dan stapnya. Sarana

perangkat kerasnya: rumah kyai/ustadz, pondok, gedung-gedung sekolah, halaman untuk berbagai keperluan, gedung kantor kepala sekolah, pengurus, ruang guru, perpustakaan, aula, dan laboratorium.

Lembaga pesantren ini mempunyai ciri, tujuan, dan penekanan yang berbeda-beda. Dari perbedaan antara suatu lembaga pesantren dengan lembaga pesantren lain nampaknya ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Sistem pengajaran pondok pesantren dapat dikelompokkan, baik dari sistem model pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional maupun formal sebagai berikut:

- a. Aktor atau pelaku, kyai, ustadz, santri dan pengurus.
- b. Sarana perangkat keras: masjid, rumah kyai, rumah dan asrama ustadz, pondok/asrama santri, gedung sekolah atau madrasah, lahan untuk olahraga, pertanian, peternakan, empang, makam dan sebagainya.
- c. Sarana perangkat lunak: tujuan, kurikulum, kitab, penilaian, tata tertib, perpustakaan, pusat dokumentasi, dan penerangan, cara pengajaran (sorogan, bandongan dan *halaqah*), keterampilan, pusat pengembangan masyarakat dan alat-alat pendidikan lainnya.

Kelengkapan unsur-unsur tersebut berbeda-beda diantara pesantren yang satu dengan pesantren yang lainnya. Sistem pendidikan pesantren didasari, digerakan dan diarahkan dengan nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada ajaran dasar islam.

Sedangkan Stenbrink (1986:109) senada dengan Dhofier bahwa unsur-unsur pendidikan pondok pesantren sebagai sistem pendidikan terdiri atas kyai, santri, asrama (pondok), kitab kuning dan masjid.

a. Peranan Kyai

Di pondok pesantren, kyai memegang kekuasaan mutlak dan wewenang dalam kehidupan pondok pesantren. Menurut Madjid (1997:20) perkataan kyai selain bermakna tua, juga mengandung pengertian penguasaan pada yang tua, sakral, keramat, dan sakti. Kyai adalah figur yang berperan sebagai pemberi nasehat dalam berbagai kehidupan masyarakat. Kyai dalam dinamika perubahan sosial berperan sebagai pamong agama dan budaya, menyaring nilai-nilai luar, dan memerintahkan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan santri khususnya.

b. Kedudukan Santri

Menurut Madjid (1997: 19) asal usul perkataan santri itu ada sekurang-kurangnya dua pendapat. *Pertama*, adalah pendapat yang mengatakan bahwa santri itu berasal dari kata “sastri”, sebuah kata dari bahasa Sansakerta, yang artinya melek huruf. *Kedua*, adalah pendapat yang menyatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, persisnya dari kata *cantrik* yang artinya seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana pun guru itu pergi menetap.

Sedangkan menurut Stenbrink (1994:16) santri merupakan komunitas terpelajar di pondok pesantren. Dalam komunitas tersebut, terdiri atas kelompok-kelompok anak didik yang terikat oleh tradisi, sistem, dan kebiasaan serta hukum-hukum yang khas di pondok pesantren.

Kehidupan santri di pondok pesantren selalu memperhatikan amaliyah sunat seperti halnya shaum dan shalat malam, selalu berhati-hati, hormat dan tawadhu kepada ustadz-ustadz atau terlebih-lebih kepada kyai (Stenbrink, 1994: 16). Karena kehidupan di pondok pesantren dalam suasana khas keagamaan, dan kedisiplinan langsung dibawah bimbingan atau pengawasan kyai dan para ustadz.

Kehidupan santri di pondok pesantren ditandai dengan suasana kebersahajaan yang dibingkai dengan sifat kejujuran dan tawadhu yang didasari dengan nilai-nilai religius tinggi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah rasul serta kitab klasik.

c. Asrama (Pondok)

Keberlangsungan aktivitas santri dalam menimba ilmu di pondok pesantren, erat kaitanya dengan tempat pemondokan (asrama) sebagai tempat kediaman dan belajar para santri. Keadan tersebut kadang terlupakan dari konsep pendidikan pondok pesantren bahwa tradisi pendidikan pondok pesantren dilatar belakangi oleh suatu pembangunan pondok (asrama), karena para santri kebanyakan bukan berasal dari lingkungan sekitar pondok pesantren, maka konsekuensinya mereka harus tinggal di asrama.

d. Kitab Kuning

Kitab kuning merupakan kitab tentang ilmu-ilmu keislaman yang dipelajari di pesantren, ditulis dengan bahasa Arab dan sistematika klasik. Di pondok pesantren, kitab kuning sebagai khazanah keilmuan dan juga sebagai sistem nilai yang di pegang dan mewarnai seluruh aspek kehidupan di pondok pesantren. Kitab kuning mewujudkan paham keagamaan, tata cara peribadatan,

pergaulan etika, cara pandang kehidupan warga pondok pesantren dan warga pengikutnya, serta cara tradisi.

Kitab kuning merupakan sumbangsih ulama terdahulu dalam melahirkan suatu wacana keilmuan, baik berupa materi maupun terwujud pemikiran. Banyak sudah pemikiran ulama terdahulu menjadi referensi utama dalam membangun tradisi keilmuan islam sekarang ini.

Karya para ulama tersebut dapat dilihat dari berbagai disiplin ilmu yang ada, antara lain ilmu fiqih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadits, dan ilmu-ilmu lainnya.

e. **Fungsi Masjid**

Masjid di pondok pesantren merupakan pemusatan aktifitas para santri, baik dalam beribadah, keagamaan maupun ukhuwah islamiyah sebagaimana kita ketahui bahwa pada zaman Rasulullah saw, masjid merupakan pusat kegiatan umat islam, baik pada aspek agama, politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, fungsi masjid merupakan bagian dari bangunan pranata sosial, diharapkan jadi sumber utama di dalam memperkenalkan bentuk-bentuk kegiatan islam atas asas manfaat sebagai perwujudan akhlakul karimah.

4. Ciri dan Jenis Pondok Pesantren.

Ciri-ciri atau karakteristik sebuah pesantren menjadi amat penting untuk diketahui agar diperoleh pemahaman lebih utuh tentang pondok pesantren. Dhofier (1982:44-45) mengemukakan lima ciri dari suatu Pondok Pesantren, yaitu: Pondok, Masjid Pengajian kitab-kitab Islam klasik/kitab kuning, Santri dan

Kyai, sementara itu ciri-ciri pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama islam lain yang dikemukakan oleh Departemen Agama (2003:40) dimana pesantren memiliki komponen-komponen berikut; Kyai, sebagai pimpinan pondok pesantren; Santri yang bermukim di asrama dan belajar pada Kyai; Asrama sebagai tempat tinggal para santri; Pengajian sebagai bentuk pengajaran Kyai terhadap para santri; Masjid sebagai pusat pendidikan dan pusat kompleksitas kegiatan pondok pesantren.

Dari kedua pendapat di atas dikemukakan penjelasan untuk masing-masing komponen tersebut sebagai berikut:

- a. **Pondok**, sebuah pesantren pada dasarnya adalah suatu lembaga pendidikan yang menyediakan asrama atau pondok (pemondokan) sebagai tempat tinggal bersama sekaligus tempat belajar para santri di bawah bimbingan Kyai. Asrama untuk para santri ini berada dalam lingkungan komplek pesantren dimana Kyai bersama keluarganya bertempat tinggal serta adanya masjid sebagai tempat untuk beribadah dan tempat untuk mengaji bagi para santri.
- b. **Masjid**, elemen penting lainnya dari pesantren adalah adanya masjid sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri baik untuk pelaksanaan shalat lima waktu, shalat jum'at, khutbah maupun untuk pengajaran kitab-kitab kuning. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan ini merupakan manifestasi universal dari sistem pendidikan islam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat dan orang-orang sesudahnya. Tradisi yang dipraktekkan Rasulullah ini terus dilestarikan oleh kalangan pesantren. Para Kyai selalu mengajar murid-muridnya di masjid. Mereka menganggap masjid

sebagai tempat yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai kepada para santri, terutama ketaatan dan kedisiplinan. Penanaman sikap disiplin kepada para santri dilakukan melalui kegiatan shalat berjamaah setiap waktu di masjid, bangun pagi serta yang lainnya. Oleh karena itu, masjid merupakan bangunan yang pertama kali dibangun sebelum didirikannya Pondok Pesantren.

- c. Pengajian Kitab-Kitab Kuning (Kitab Klasik Islam).** Tujuan utama dari pengajian kitab-kitab kuning adalah untuk mendidik calon-calon ulama. Sedangkan bagi para santri yang memiliki waktu singkat tinggal di pesantren, mereka tidak bercita-cita menjadi ulama, akan tetapi bertujuan untuk mencari pengalaman dalam hal pendalaman perasaan keagamaan. Keseluruhan kitab-kitab kuning yang diajarkan sebagai materi pembelajaran di pesantren secara sederhana dapat dikelompokkan kedalam sembilan kelompok, yaitu: Tajwid, Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadits, Aqidah, Akhlak/Tasawuf, Fiqh, Nahwu (*syntax*) dan Sharaf (morfologi), Manthiq dan Balaghah, dan Tarikh Islam.
- d. Kyai dan Ustadz,** *The kyai is the most essential element of a pesantren, because he, assisted by some ustadzs, leads and teaches Islam to the santris. In many cases, he is even the founder of the pesantren* (Raihani, 2001:27). Kyai dan ustadz (asisten kyai) merupakan komponen penting yang amat menentukan keberhasilan pendidikan di pesantren. Biasanya kyai atau ustadz adalah pendiri dan pemilik pesantren. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan suatu pesantren amat bergantung pada figur kyai atau ustadz

tadi, sehingga pertimbangan utama seorang santri yang akan memasuki suatu pesantren adalah berdasar pada kebesaran nama yang disandang oleh kyainya.

Meskipun secara umum ciri-ciri pondok pesantren hampir sama atau bahkan sama, namun dalam realitasnya terdapat beberapa perbedaan terutama dilihat dari proses dan substansi yang diajarkan. Secara umum pondok pesantren dapat dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu Pesantren Salafiyah dan Pesantren Khalafiyah. Pesantren Salafiyah sering disebut sebagai pesantren tradisional, sedang Pesantren Khalafiyah disebut pesantren modern.

Pondok Pesantren Salafiyah adalah pondok pesantren yang masih tetap mempertahankan sistem pendidikan khas pondok pesantren, baik kurikulum maupun metode pendidikannya. Bahan ajaran meliputi Agama Islam dengan menggunakan kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing santri.

Sedangkan Pesantren Khalafiyah adalah pondok pesantren yang mengadopsi Madrasah atau Sekolah, dengan kurikulum disesuaikan dengan kurikulum Pemerintah baik dengan Departemen Agama, maupun Departemen Pendidikan Nasional.

Pondok pesantren dapat dikategorikan juga menjadi pesantren besar, sedang, dan kecil. Pendapat ini senada dengan pendapat Dhofier (1982:44) berikut ini:

”Sebuah pondok pesantren dikatakan kecil apabila memiliki santri dibawah 100-1000 orang santri dan pengaruhnya hanya sebatas kabupaten. Pondok pesantren yang memiliki santri antara 1000-2000 yang pengaruh dan rekrutmen santrinya meliputi beberapa kabupaten. Sedangkan pondok pesantren besar memiliki santri lebih dari 2000 orang dan biasanya berasal dari beberapa kabupaten dan provinsi”.

Menurut para ahli sosial dan agama, tipologi pondok pesantren dibagi menjadi dua tipologi, yaitu (1) pondok pesantren *shalaf* (tradisional), dan (2) pondok pesantren *khalaf* (modern). Untuk lebih jelasnya kedua tipologi pesantren tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Shalaf (Tradisional)

Pondok pesantren salaf adalah lembaga pondok pesantren yang mempertahankan kitab-kitab Islam klasik (*shalaf*) sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah diterapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai pada lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenal pengajaran pengetahuan umum (Dhofier, 1982:41)

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren menyelenggarakan pengajaran dengan mempertahankan kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan serta menggunakan sistem sorogan tanpa mengenal pengajaran umum. Adapun penjejian dilakukan dengan cara memberikan kitab pegangan yang lebih tinggi dengan Funun (tema kitab) yang sama, setelah satu kitab selesai dipelajari.

2. Pondok Pesantren Khalaf (Modern)

Pondok pesantren khalaf adalah lembaga pondok pesantren yang telah memasukan pelajaran-pelajaran dalam madrasah-madrasah yang dikembangkan, atau membuka tipe-tipe sekolah umum dalam lingkungan pondok pesantren (Dhofier, 1982:41). Sedangkan menurut Wahyoetomo (1997:8) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pondok pesantren khalaf adalah lembaga pondok pesantren yang memasukan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang

dikembangkan, atau pondok pesantren yang menyelenggarakan tipe-tipe sekolah umum seperti SMP, SMU, dan bahkan perguruan tinggi dalam lingkungannya.

Sementara itu, yang dimaksud pondok pesantren *khalaf* menurut Departemen Agama RI, adalah pondok pesantren selain menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan, juga menyelenggarakan pendidikan formal (jalur sekolah), baik itu sekolah umum (SD, SMP, SMU, dan SMK). Maupun sekolah berciri khas agama Islam (MI, MTs, MA, atau MAK).

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren *khalaf* adalah lembaga pondok pesantren yang telah membuka sistem sekolah di lingkungan pondok pesantren dengan ciri khas keislaman serta kurikulum yang digunakan, kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional bagi pelajaran umum, sedangkan pembelajaran di pondok pesantren menggunakan kurikulum yang klasikal dan berjenjang.

Adapun penjenjangan yang dilakukan pondok pesantren *khalaf* berdasarkan pada sekolah formal, atau berdasarkan pengajiannya seperti pondok pesantren salaf. Dengan demikian perkembangan pondok pesantren dibagi dalam beberapa bentuk, sebagaimana disebutkan dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1979 (DEPAG RI, 2001: 24-25) sebagai berikut:

- a. Pondok pesantren tipe A, yaitu pondok pesantren tempat para santri belajar dan tempat tinggal diasrama lingkungan pondok pesantren dengan pembelajaran yang dilakukan secara tradisional (sorogan dan wetonan).
- b. Pondok pesantren tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikatif dan

diberikan pada waktu-waktu tertentu. Para santri tinggal di asrama dilingkungan pondok pesantren.

- c. Pondok pesantren tipe C, yaitu pondok pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan para santrinya belajar diluar (madrasah atau sekolah umum) dan kyai hanya merupakan pengawas dan pembinaan mental para santri
- d. Pondok pesantren tipe D, yaitu pondok peantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.

Pondok pesantren yang menjadi batasan pada pembahasan ini, adalah pondok pesantren yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu yang telah menjadi bagian yang mendalam dari sistem kehidupan umat Islam sebagai golongan masyarakat Indonesia yang telah mengalami perubahan-perubahan dari zaman ke zaman seiring dengan perjalanan umat, melalui perkembangan pendidikan dalam upaya mempelajari, menghayati serta mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pada keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Mastuhu: 1984:55).

Pondok pesantren memandang akan pentingnya pendidikan moral agama yang dimanifestasikan dalam prilaku dan aktivitas kehidupan sehari-hari sebagai ibadah kepada Allah. Pendidikan pondok pesantren terpusat pada pendalaman dan penghayatan agama dengan lebih menekankan kepada prilaku idealis normative menurut rambu-rambu hokum agama (fiqih) dari perilaku yang materialistis dan relevansinya dengan pengalaman hidup keduniawian.

Tujuan adalah sasaran yang akan dicapai seseorang atau sekelompok orag dalam melakukan suatu kegiatan. Adapun kaitannya dengan istilah tujuan

pendidikan, identik dengan istilah tujuan, sasaran dan maksud. Dalam bahasa Arab yaitu *gha-yah*, *adhaf* dan *maqasid*.

Secara etimologi, *aim* (tujuan) berarti aksi yang seseorang melakukan cara untuk mencapai satu titik (Horby,1974:29). Menurut Hirst dan Peters, arti dasar *aim* adalah menembak satu target tertentu yang terletak dalam satu jarak tertentu. Artinya untuk mencapai suatu target yang harus dilakukan secara sistematis. Usaha yang dilakukan untuk menuju target tersebut merupakan karakteristik utama *goal*. Dari sini dapat dikatakan bahwa *aim* dan *goal* adalah sinonim (Abdullah, 1991:149).

Istilah *gha-yah* dipergunakan untuk menentukan tujuan akhir (*muntho*), sehingga sesudah mencapai tujuan akhir tidak ada lagi sesuatu yang hendak dicapai. Kata *adhaf*, mulanya berarti tempat-tempat tinggi, tempat seseorang dapat mengawasi sekitarnya. Arti lainnya adalah yang lebih pendek. Istilah ketiga adalah *maqasid* yang merupakan kata jadian *qashada*. Asal katanya menunjukkan makna jalan yang lurus (Al-Munawar, 1984:235).

Perbedaan istilah-istilah tersebut di atas, Abdullah menyimpulkan bahwa istilah *aim*, *goal*, *ghayat* dan *tujuan* menunjukkan makna sama yaitu hasil pendidikan secara umum yang menunjuk pada futuritas jarak tertentu, dan tidak dapat dicapai kecuali dengan proses panjang yang bersifat ideal. Sedangkan istilah objektif, *adhaf* dan *sasaran* mengandung pengertian khusus, spesifik dan operasional karena dinyatakan dalam bentuk yang nyata. Adapun istilah *purpose* mengandung pengertian yang sama dengan istilah *maqasid* dan *maskud*, yaitu menunjukkan hasil pendidikan yang lebih operasional dan lebih realitas (Abdullah, 1948:150).

5. Lahirnya Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan.

Pondok pesantren menurut sejarah akar berdirinya di Indonesia, ditemukan dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi islam sendiri, yaitu tradisi tarekat. Pondok pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi; *Kedua*, pondok pesantren yang kita kenal sekarang pada awalnya merupakan pengambil alihan dari sistem pondok pesantren yang diadakan orang-orang Hindu di Nusantara (Depag, 2003:10). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia, lembaga pondok pesantren sudah ada di negeri ini. Pendirian pondok pesantren di Indonesia baru diketahui keberadaan dan perkembangannya setelah abad ke-16.

Menurut Bruinessen (1995:17) tradisi pengajaran agama islam seperti yang muncul di pesantren Jawa dan lembaga-lembaga serupa di luar Jawa merupakan suatu tradisi agung (*great tradition*). Namun, bagaimanapun asal mula terbentuknya, pondok pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan dan keagamaan islam tertua di Indonesia yang perkembangannya berasal dari masyarakat di sekitarnya. Walaupun sulit diketahui kapan permulaan munculnya, namun banyak dugaan yang mengatakan bahwa lembaga pondok pesantren mulai berkembang tidak lama setelah masyarakat islam terbentuk di Indonesia, dan kemunculannya tidak terlepas dari upaya untuk menyebarkan agama islam di masyarakat.

F. Makna Kyai dan Santri

1. Pengertian Kyai

Dalam Ensiklopedia Islam (Dasuki,1994:61) disebutkan secara kebahasaan “kyai” mengandung pengertian seseorang yang dipandang alim (pandai) dalam bidang agama Islam, guru ilmu ghaib, pejabat kepala distrik (di Kalimantan Selatan) atau benda-benda yang bertuah. Selain itu pula, Kyai merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli agama Islam yang memiliki atau yang menjadi pimpinan pondok pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Menurut Dhofier (1982:55) Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung kepada pribadi kyainya. Selain gelar kyai juga sering disebut juga alim (Dhofier, 1994:55). Alim atau ulama bermakna seseorang yang ahli dalam pengetahuan Islam di kalangan umat Islam. Di Jawa Barat disebut juga ajengan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ulama yang memimpin pesantren disebut kyai.

Sementara itu Djaelani (1994:3) menyatakan bahwa ulama adalah jamak dari kata “alin” yang berarti seseorang yang memiliki ilmu yang mendalam luas, dan mantap. Karena itu, ulama adalah orang-orang yang memiliki kepribadian dan akhlak yang dapat menjaga hubungan yang dekat kepada Allah SWT. Dan memiliki benteng kekuatan untuk menghalau dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh-Nya, tunduk, patuh, dan “khasyyah” kepada-Nya. Rasulullah SAW. Memberikan rumusan tentang ulama dengan sifat-ifatnya. Menurut beliau ulama adalah hamba Allah yang berakhlak Qur’ani yang menjadi “warasatul

anbiya” (pewaris para nabi), qudwah (pemimpin dan panutan), khalifah, pengembangan amanah Allah, penerang bumi, pemelihara kemaslahatan dan kelestarian hidup manusia.

Sejalan pula dengan syekh Muhammad Nawawi (Djaelani, 1994:4) yang memberikan pengertian, ulama adalah hamba Allah dengan pengertian hakiki, pewaris nabi, pelita umat dengan ilmu dan bimbingannya, menjadi pemimpin dan panutan yang uswah hasanah dalam ketaqwaan dan istiqamah, menjadi landasan baginya dalam beribadah dan beramal shaleh, selalu benar dan adil. Kyai merupakan orang yang dianggap menguasai agama Islam dan biasanya mengelola dan mengasuh pondok pesantren. Karena itu sebutan kyai diberikan kepada orang-orang yang menguasai ilmu agama, mempunyai charisma dan berpengaruh baik dalam lingkup regional maupun nasional.

2. Konsep dan Pengertian Santri

Santri adalah seseorang yang selalu mengikuti seorang guru ke mana guru itu pergi dengan tujuan dapat belajar darinya satu keahlian. Santri adalah siswa atau mahasiswa yang dididik di lingkungan pesantren.

Santri adalah satu komunitas terpelajar yang memiliki posisi yang sangat baik dan strategis yang terikat dengan tradisi, system dan kebiasaan serta hokum-hukum yang ada dalam komunitas podok pesantren. Menurut Iskandar dalam Djaelani (1994:8) santri adalah julukan kehormatan, karena seseorang bias mendapat gelar santri bukan semata-mata sebagai pelajar atau mahasiswa, tapi karena santri memiliki akhlak yang berlainan dengan orang awam yang ada di

sekitarnya”. Bila santri keluar dari pondok pesantren, maka yang berbekas adalah santrinya yang memiliki akhlak dan kepribadian santri.

Santri bias digolongkan dua macam: (1) santri yang menetap (mukim) di pesantren, (2) santri yang tidak menetap, tetapi pulang sesuai belajar (nglaju). Maka lahirlah sebutan santri mukim dan santri yang nglaju, lazim disebut santri kalong.

Dari paparan tersebut di atas, bias disimpulkan bahwa santri adalah komunitas terpelajar yang memiliki posisi yang strategis, terikat dengan tradisi, system, kebiasaan serta hokum-hukum yang ada di pesantren.

G. Pendidikan Nilai di Lingkungan Pondok Pesantren

Menurut Poedjiadi (1999:69) nilai merupakan ukuran tertinggi dari perilaku manusia dan dijunjung tinggi oleh sekelompok masyarakat serta digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Nilai merupakan hal yang bergantung kepada penangkapan dan perasaan orang yang menjadi subjek. Nilai merupakan tingkat atau derajat yang diinginkan oleh manusia. Selain itu, nilai juga merupakan tujuan dari kehendak manusia yang benar dan ditata menurut susunan tingkatannya. Adapun susunan nilai yang paling tinggi adalah nilai religius.

Sementara Soelaiman (1988:162) mengungkapkan bahwa religi merupakan sumber nilai yang pertama dan utama. Perealisasian nilai religi berlangsung dalam situasi yang konkrit dari perilaku yang ditampilkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Hakam (2000:43) mengungkapkan bahwa nilai

merupakan kepercayaan-kepercayaan yang digeneralisir yang berfungsi sebagai garis pembimbing untuk menyeleksi tujuan serta perilaku yang akan dipilih untuk dicapai.

Selain nilai yang bersifat personal dalam diri manusia, ada juga yang berasal dari luar diri manusia, yaitu moral. Menurut Djahiri (1996:18), moral adalah tuntutan keharusan/keyakinan orang lain atau kelompok masyarakat di mana yang bersangkutan berada atau menjadi warga yang bersangkutan. Moral dari luar yang bersifat keharusan harus mampu diterima mempribadi menjadi keyakinan yang dianut dan disetujui maka menjadi suara hati dan tidak lagi bersifat keharusan atau tuntutan dari luar, melainkan menjadi keharusan yang datang dari dalam diri serta menjadi kelayakan dan bahkan dirasakan sebagai kewajiban dan kebutuhan moral serta tampil sebagai kiprah diri atau kepribadian.

Atkinson dalam Djahiri (1996) menjelaskan tentang pembagian moral ke dalam tiga kualifikasi, yaitu: 1) *moral ethics* yang meliputi nilai moral yang datang dari dalam diri dan prinsip benar dan salah; 2) *imperative moral* (perintah); 3) *moral action* yang meliputi tindakan terlarang, moral yang sudah tentu, moral sosial atau tingkah laku yang berlaku bagi seseorang, umum, dan segala kehidupannya.

Menurut Wahid (1988:45), sistem nilai yang digunakan dalam pendidikan di pondok pesantren adalah sistem nilai yang berakar pada ajaran agama Islam (Al-Quran dan Sunnah). Dalam menjalankan sistem tersebut, pondok pesantren terlibat dalam proses penciptaan tata nilai yang memiliki dua unsur utama, yaitu peniruan dan pengekanan. Unsur *pertama* peniruan, yaitu usaha yang dilakukan

terus menerus secara sadar untuk mengindahkan pola kehidupan para sahabat Nabi Muhammad Saw dan para ulama salaf ke dalam praktek kehidupan pondok pesantren yang tercermin dalam ketaatan beribadat ritual secara maksimal, penerimaan atas kondisi material yang relatif serba kurang, dan kesadaran kelompok yang tinggi.

Unsur *kedua* pengendalian, yaitu memiliki perwujudan utama dalam disiplin sosial yang ketat di pondok pesantren. Pengendalian digunakan untuk mengukur kesetiaan santri kepada pondok pesantren dalam melaksanakan pola kehidupan yang diperintahkan Al-Quran dan Sunnah sehingga santri menjalankan aturan-aturan tersebut secara penuh kesadaran.

Sikap hidup untuk berdiri di atas kaki sendiri dan besarnya perhatian terhadap kasus-kasus sosial dalam masyarakat merupakan hasil nyata dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan Islam mempunyai nilai kebenaran pendidikan yang tidak bersifat relatif tetapi mempunyai nilai keimanan dan ketakwaan yang merujuk kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.

Proses pendidikan di pondok pesantren meskipun dilaksanakan secara tradisional, namun terdapat beberapa kegiatan yang umumnya dilakukan oleh pengelola pondok pesantren unik dan bersifat edukatif. Dalam hubungan ini dominasi Kyai sebagai pimpinan pondok dalam menentukan hal-hal yang harus dilakukan dalam menjalankan kegiatan pendidikan, bahkan oleh beberapa Pakar dipadankan sebagai raja, "*A pasantren is paralleled by some experts as a kingdom in which the kyai is the king. This implies that the kyai has total power and*

authority to control any aspect of his pesantren” (Raihani, 2001:30). Berikut ini akan di kemukakan beberapa kegiatan yang umumnya di lakukan atau perlu di lakukan dalam mengelola proses pendidikan di Pondok Pesantren.

H. Hubungan Pendidikan Umum dengan Pendidikan Pesantren

Dalam sejarah perkembangan pendidikan di Eropa Barat dan Amerika Serikat, pendidikan umum atau *general education* muncul setelah adanya pendidikan liberal atau disebut *liberal education*. Pendidikan umum pada awalnya diperuntukkan sebagai sikap protes terhadap spesialisasi ilmu pengetahuan yang berlebihan. Akan tetapi dalam perkembangannya, istilah pendidikan umum dengan pendidikan liberal sering digunakan secara bergantian. Perbedaan antara pendidikan umum dengan pendidikan liberal terletak pada faktor perhatiannya dalam proses pendidikan. Pendidikan liberal lebih terfokus pada pemenuhan mata pelajaran sebagai warisan tradisi budaya aristokratis, sedangkan Pendidikan umum dalam arti *general education* lebih berorientasi pada pribadi siswa sebagai fokus utamanya. Perbedaan lain, pendidikan liberal lebih diarahkan pada pengembangan intelektual, sementara pendidikan umum didasarkan pada upaya pengembangan individu dalam skala yang lebih luas, tidak saja menyangkut pengembangan intelektual, tetapi meliputi emosi, sosial, dan moral peserta didik.

Istilah pendidikan umum terkadang masih mengundang multiperspektif bagi sebagian orang, sehingga dirasakan perlu memberikan sebuah pengertian dalam rangka memberikan penegasan, Sumaatmadja (2002:103) menafsirkan pendapat McConnel dan Titus bahwa pendidikan umum dalam *liberal education*

merupakan pendidikan yang perhatiannya kepada sejumlah mata pelajaran (*subject matter oriented*), yang organisasi kurikulumnya terarah pada pengembangan logika dan mengikuti garis sistematika bidang-bidang pengetahuan.

Sasaran dari *liberal education* menurut Sumaatmadja (2002:105) adalah:

1) memberikan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, meliputi liberal arts, filsafat, bahasa, matematika, dan pengetahuan alam, 2) membekali peserta didik dengan latar belakang budaya yang luas serta memberikan peluang kepada manusia memiliki wawasan yang memadai tentang dunia kehidupannya, dan 3) mengembangkan peserta didik menjadi manusia merdeka, terbebas dari keterbelengguan sehingga mampu mengambil keputusan yang adil, arif, dan bijaksana.

Sedangkan pendidikan umum sebagai *general education* menurut Mulyana (1999:4) adalah upaya mengembangkan keseluruhan kepribadian seseorang dalam kaitannya dengan masyarakat lingkungan hidup, dengan tujuan agar: 1) peserta didik memiliki wawasan yang menyeluruh tentang segala aspek kehidupan, serta 2) memiliki kepribadian yang utuh. Istilah menyeluruh dan utuh merupakan dua terminologi yang memerlukan isi dan bentuk yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya dan keyakinan suatu bangsa.

Menurut McConnel dalam Sumaatmadja (2002:107) pendidikan umum dalam tataran *general education* berfungsi untuk mempersiapkan generasi muda dalam kehidupan umum sehari-hari sesuai dengan kelompok mereka yang merupakan unsur kesatuan budaya, berhubungan dengan seluruh kehidupan yang memenuhi kepuasan dalam keluarga, pekerjaan, sebagai warga negara, selaku ummat yang terpadu serta penuh dengan makna kehidupan. Pendek kata, pendidikan umum mempersiapkan peserta didik, terutama generasi muda untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, yang manusiawi, mengenal dirinya sendiri, mengenal manusia lain di sekelilingnya, sadar akan kehidupan yang luas dengan segala masalah dan kondisinya yang menjadi hak dan kewajiban tiap orang untuk memberdayakannya sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan akhirnya selaku ummat manusia sebagai ciptaan Tuhan Maha Pencipta.

Sementara Phenix (1964:5) berargumen bahwa pendidikan harus dikembangkan pada diri setiap orang, karena bersifat umum untuk setiap orang. Pendidikan umum merupakan proses membina makna-makna yang esensial, karena hakikatnya manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk mempelajari dan menghayati makna yang esensial sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pendidikan umum membimbing pemenuhan kehidupan manusia melalui perluasan dan pendalaman makna yang menjamin kehidupan yang bermakna manusiawi. Pendidikan umum membina pribadi yang utuh, terampil berbicara menggunakan lambang dan isyarat yang secara faktual diinformasikan dengan baik, mampu berkreasi dan menghargai hal-hal yang secara meyakinkan memenuhi estetika, ditunjang oleh kehidupan yang penuh

disiplin dalam hubungan pribadi dengan pihak lain, memiliki kemampuan membuat keputusan yang benar terhadap yang salah, serta memiliki wawasan yang integral, memiliki kemampuan dan wawasan yang luas tentang kehidupan manusia.

Sumaatmadja (2002:105) mengungkapkan bahwa sasaran yang hendak dituju dalam pendidikan umum adalah: 1) memberikan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, yang meliputi liberal arts, filsafat, bahasa, matematika, dan pengetahuan alam, 2) membekali peserta didik dengan latar belakang budaya yang luas yang memberikan peluang kepada manusia memiliki wawasan yang memadai tentang dunia kehidupannya, dan 3) mengembangkan peserta didik menjadi manusia merdeka, terbebas dari keterbelengguan sehingga mampu mengambil keputusan yang adil, arif, dan bijaksana.

Henry dalam Mulyana (2002:7) mengungkapkan ada lima tujuan dasar pendidikan umum, yakni: 1) mengembangkan intelegensi kritis yang dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, 2) mengembangkan dan meningkatkan karakter moral, 3) mengembangkan dan meningkatkan kewarganegaraan, 4) menciptakan kesatuan intelektual dan keharmonisan, dan 5) memberikan kesempatan yang sama sedapat mungkin melalui pendidikan untuk peningkatan ekonomi dan sosial individu.

Dari tujuan pendidikan umum di atas menunjukkan betapa luas dan menyeluruhnya kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak didik, agar dapat menjadi pribadi, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Tujuan pendidikan umum bersifat menyeluruh seperti tersebut di atas tidak akan mungkin dapat dicapai oleh pendidikan yang hanya bersifat spesialisasi dan yang memilah-milah pengalaman belajar anak didik. Tujuan seperti ini hanya akan dapat dicapai oleh pendidikan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, yakni melalui pendidikan umum.

Hubungannya dengan pendidikan di pesantren, maka pola pendidikan di pesantren dengan tujuan membentuk santri yang memiliki *akhlakul karimah* dengan pemahaman yang utuh merupakan salah satu pendekatan dalam implementasi pendidikan umum di lingkungan masyarakat.